

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kapabilitas intelektual masyarakat dan menjadi indikator bagi kemajuan negara. Di Indonesia sendiri, pentingnya peran sekolah sebagai institusi formal untuk membentuk generasi muda, terutama di daerah-daerah yang mengupayakan perluasan dan pengembangan fasilitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia mengalami banyak fenomena dan tantangan yang terjadi dilapangan, berbagai tantangan tersebut menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia, jika dicermati dan dianalisa ada beberapa fenomena utama yang menjadi hal yang bisa dicermati seperti, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, kompetensi pengajar serta staf kependidikan, dan kurikulum yang sepenuhnya tak relevan¹

Jika berbicara tentang akses pendidikan tentu berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan akses akses penunjang, di Indonesia sendiri pemerataan akses pendidikan masih menjadi masalah yang mengakibatkan terjadinya kesulitan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, Guna mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap individu mendapatkan hak pendidikan yang layak dalam kapasitasnya sebagai penduduk.

Upaya mewujudkan keadilan pendidikan yang setara sesuai mandat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 masih terhambat oleh minimnya fasilitas di wilayah Indonesia lainnya, menghadapi situasi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainya perlu merumuskan sebuah satu terobosan strategis untuk

¹ Anugrah Dwi/ *MASALAH PENDIDIKAN YANG UMUM TERJADI DI INDONESIA*/ <https://fkip.umsu.ac.id/masalah-pendidikan-yang-umum-terjadi-di-indonesia/> Diakses pada 29 januari 2025

meningkatkan standar layanan pendidikan didaerah-daerah diluar perkotaan yang selama ini terabaikan

Terdapat 3 pilar utama dalam upaya ini yaitu, optimalisasi peran sekolah penggerak dalam mentransfer pemahaman serta teknis implementasi kurikulum merdeka ke institusi pendidikan lainnya, lalu urgensi keterlibatan pemerintah daerah dalam membenahi aspek fundamental, lalu peningkatan alokasi tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi guna mengakselerasi standarisasi mutu pendidikan diseluruh penjuru tanah air

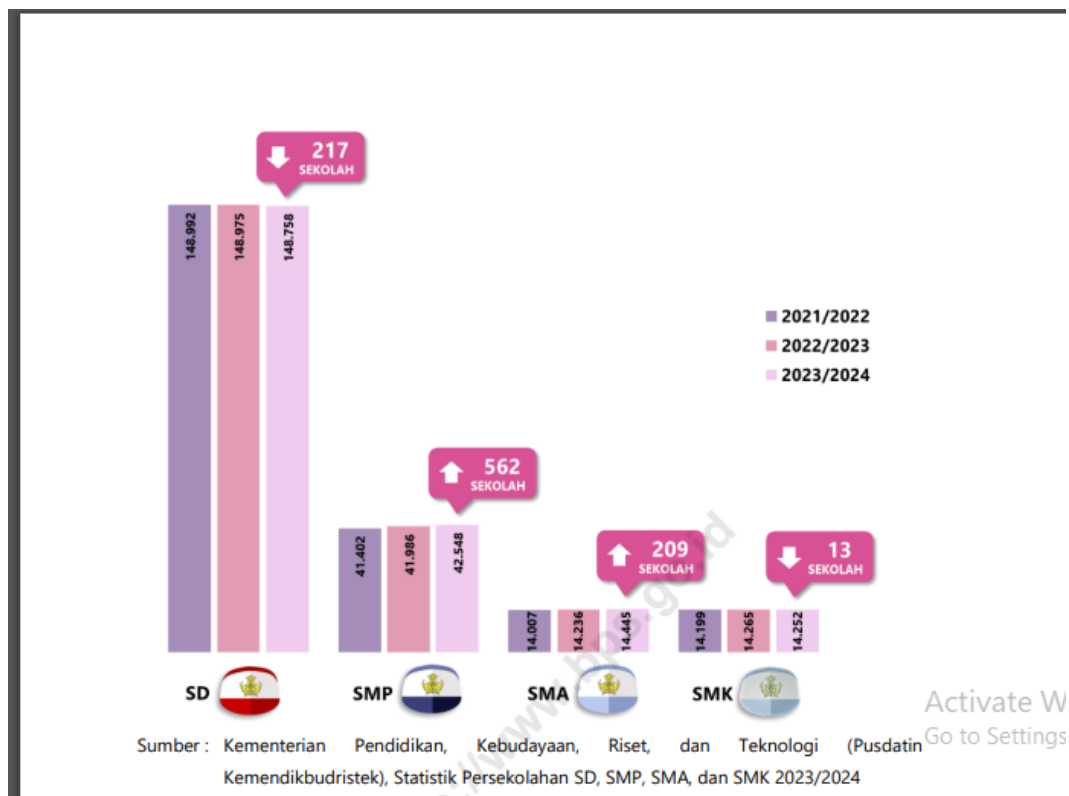
Angka partisipasi sekolah dapat ditingkatkan melalui pemerataan sebaran institusi pendidikan yang memudahkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini harus didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, karena suasana sekolah yang tenang dan nyaman sangat menentukan keberhasilan transfer ilmu. Dengan demikian, infrastuktur bukan sekedar fisik, melainkan penunjang utama dalam sistem pendidikan (Virdam dan Ariani, 2023)

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah pada jenjang SMP dan SMA mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP yaitu sebanyak 562 sekolah baru. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK jumlah sekolah justru mengalami penurunan yaitu sebanyak 217 SD dan 13 SMK sudah tidak melakukan aktivitas pembelajaran.²

Peningkatan jumlah sekolah jenjang SMP dan SMA ini menunjukkan adanya langkah strategis otoritas publik dalam mengakselerasi jangkauan layanan edukasi di tingkat SMP dan SMA menjadi prioritas utama guna memastikan setiap warga negara berhak mendapatkan hak belajarnya di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

² www.bps.go.id, Statistik Pendidikan 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>/ Diakses pada 29 januari 2025

Teknologi (Kemendikbudristek), penambahan sekolah baru di jenjang SMP terutama terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.



Gambar 1. 1. Jumlah Infrastruktur Sekolah di Indonesia

Untuk Provinsi Sumatera Barat pemerataan akses pendidikan sendiri selaras dengan capaian yang telah ditunjukkan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026. Adapun visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Visi ini didukung oleh 7 misi yang akan dicapai pada akhir masa pemerintahan Gubernur Mahyeldi yang berakhir di tahun 2026. Pada misi ke-1 yang berbunyi “Meningkatkan Kualitas SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing tertulis tujuan agar masyarakat di Provinsi Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.³

Hal tersebut diwujudkan dalam dengan pembangunan enam unit sekolah baru (usb) oleh pemerintah Sumatera Barat lewat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pembangunan tersebut terjadi di beberapa daerah Pembangunan ini mencakup terdapat enam titik pembangunan fasilitas pendidikan baru yang terdiri dari tiga SMA, dua SMK, serta satu sekolah khusus (SLB). Secara rinci, institusi tersebut meliputi SMKN Malalak, SMKN di Agam, SLB Kepulauan Mentawai, SMAN Solok Selatan, hingga SMAN 3 Gunung Talang dan SMAN 2 Sungai Geringging Pengerjaan sekolah-sekolah ini dilakukan sesuai kontrak dan direncanakan akan diserahterimakan pada akhir Desember 2024. Upaya pembangunan USB dan penambahan USB (Unit Sekolah Baru) ini menjadi upaya peningkatan taktis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di daerah yang terkendala dalam fasilitas pendidikan.

Dalam teori Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa konsep partisipasi masyarakat dapat dibagi dalam 4 tahapan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menikmati hasil, partisipasi dalam evaluasi, dalam gambaran konseptual partisipasi dalam penelitian ini, dapat digambarkan partisipasi dalam beberapa konsep. Dalam hal konsep partisipasi sebagai konsep sosial partisipasi masyarakat dipahami sebagai sebuah proses sosial dimana tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga melibatkan aspek komunikasi, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur

Dalam mekanisme penguatan pembangunan, partisipasi tidak hanya keterlibatan aktif masyarakat tetap juga dipandang sebagai mekanisme yang dapat

³sumbar.bps.go.id/profil-statistik-pendidikan-sumatera-barat-2023.
<https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/c2d2c336c8318168282213c3/educational-statistics-profile-of-sumatera-barat-province-2023.html>/ Diakses pada 29 Januari 2025

memperkuat pembangunan dan dalam konsep partisipasi dalam perspektif Administrasi Publik partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam proyek publik haruslah memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi

Aspek yang turut berperan dalam mempengaruhi dan memperkuat pembangunan pendidikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah adalah peran dan partisipasi aktif masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam pembangunan sekolah sangat penting karena masyarakat setempat tentu lebih memahami kebutuhan yang mereka inginkan dan lebih memahami kondisi lingkungannya dan memiliki kepentingan langsung terhadap kebutuhan dan keberhasilan pendidikan di wilayahnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, peran serta komunitas dalam pembangunan fasilitas pendidikan bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Hal ini meliputi penyediaan sumber daya finansial dan fisik, sumbangsih tenaga, hingga hak suara dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait tata kelola institusi pendidikan tersebut. Isbandi mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan aktif dalam seluruh siklus pembangunan lokal. Sebagaimana yang dikutiip oleh Ismanullah dan Mahendra (2021), hal ini mencakup 4 pilar utama yaitu diagnosis masalah dan potensi, penentuan solusi alternatif, eksekusi tindakan nyata, serta evaluasi terhadap hasil perubahan yang dicapai⁴

Masyarakat sebagai aktor lokal sering kali memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap keberlangsungan pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat bukan hanya mempercepat pembangunan fisik sekolah, melainkan menanamkan kesadaran akan kewajiban sekaligus

⁴ Ismatullah, L., & Mahendra, G.K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*.

membangun rasa urgensi untuk menjaga serta memelihara sekolah yang dibangun.

Keterlibatan publik merupakan elemen vital dalam pembangunan sekolah yang tidak lagi dipandang sebagai kewajiban tunggal pemerintah atau institusi terkait, melihat hal itu banyak penelitian telah menampilkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam rangkaian pembangunan sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Fenomena dari peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari berbagai infrastruktur penunjang termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekolah di daerah telah lama menjadi topik hangat dan diskusi oleh berbagai kalangan publik

Konsep partisipasi dalam konteks UU No.23/2014 menitikberatkan pada kontribusi nyata khalayak luas dalam menyampaikan masukan maupun suara mereka pada ranah publik. Bentuk dari partisipasi ini beragam seperti kontribusi dana, tenaga, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sekolah. Partisipasi masyarakat tidak hanya mendukung percepatan pembangunan fisik sekolah, tetapi memantik sebuah rasa memiliki dan memunculkan sebuah rasa untuk menjaga terhadap kelangsungan operasional sekolah tersebut. Selain itu, dengan terlibat langsung, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pendidikan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi di daerah mereka, Ismanullah dan Mahendra (2021) mengutip pandangan Conyers yang memposisikan partisipasi warga sebagai sarana identifikasi kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat setempat.⁵

Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi prioritas penting bagi setiap negara yang ingin maju, termasuk Indonesia. Melalui ketentuan dalam Pasal 31 UUD 1945, negara secara resmi memberikan proteksi hukum terhadap hak edukasi setiap individu masyarakat.. Namun, dalam

⁵ *Ibid.*

implementasinya, pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses antara daerah urban dan rural sangat terlihat, terutama dalam hal infrastruktur pendidikan. Di daerah seperti Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, akses pendidikan yang terbatas menjadi salah satu kendala utama bagi anak-anak usia sekolah., Sebagai determinan utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, pendidikan memegang peranan vital dalam mengakselerasi kemajuan suatu negara.

Di Indonesia sendiri pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu isu dan faktor utama, terutama pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperluas dan pemeratakan akses pendidikan namun tantangan yang ada dilanpangan masih ada, terutama tantangan yang terjadi di daerah daerah. Salah satu tantangan utama dalam penyediaan pendidikan di daerah adalah keterbatasan sarana dan prasana pendidikan yang menunjang pelaksanaan pendidikan itu sendiri dan sarana dan prasarana yang memadai

SMA Negeri 3 Gunung Talang, yang sedang dibangun di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat di daerah menghadapi permasalahan fasilitas pendidikan, sebelum adanya pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA mengalami kendala akibat penerapan aturan zonasi yang menjadi penghalang bagi calon siswa baru asal Nagari Talang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Penerimaan siswa yang berpatokan pada radius terdekat dari rumahnya menjadi faktor penghalang keinginan anak-anak Nagari Talang untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA

Sebelum Pembangunan SMAN 3 Gunung Talang, masyarakat Nagari Talang biasanya melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Gunung Talang dan SMAN 2 Gunung Talang. Untuk SMAN 2 Gunung Talang masyarakat Nagari Talang mengalami kendala karna jarak yang jauh, masalah muncul ketika SMAN 1

Gunung Talang mulai menerapkan aturan zonasi dan sudah mulai keterbatasan kapasitas untuk menampung para peserta didik baru. Hal tersebut menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Nagari talang yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahap SMA

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok jumlah siswa yang bersekolah di sekolah negeri di Kecamatan Gunung Talang sebanyak 2118 yang terbagi di 2 SMA Negeri dan menjadikan Kecamatan Gunung Talang sebagai Kecamatan yang memiliki ⁶murid terbanyak di Kabupaten Solok, Keterbatasan ruang belajar di sekolah yang ada menyebabkan distribusi siswa menjadi tidak merata, siswa dari daerah terpencil harus bersaing dengan siswa dari wilayah yang lebih dekat, menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan tempat belajar yang layak dan dekat dengan rumah mereka, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan siswa usia sekolah di Kecamatan Gunung Talang, kapasitas sekolah yang ada tidak lagi memadai. Pembangunan SMA Negeri 3 diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan daya tampung dan membuka ruang yang lebih luas serta memfasilitasi peluang bagi peserta didik guna mengakses pendidikan SMA.

Tabel 1. 1. Jumlah Guru, Sekolah, dan Murid di Kecamatan Gunung Talang

Jumlah Sekolah (SMA)	Jumlah Murid	Jumlah Guru
2	2118	132

(Sumber : BPS Kabupaten Solok)

⁶solok.bps.go.id. Jumlah sekolah,guru,dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok,2024/2025

<https://solokkab.bps.go.id/id/statisticstable/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-solok--2020.html?year=2020>

Untuk mengatasi masalah tersebut sempat ada keputusan untuk menambah lokal yang menampung anak-anak Nagari Talang sebanyak 50 orang, namun pada tahun berikutnya terjadi lagi permasalahan yang sama sehingga akhirnya para tokoh masyarakat Nagari Talang dan Pemerintah Nagari sepakat untuk meminta kepada pemerintah provinsi untuk pembangunan unit sekolah baru

”Pada tahun 2022 sebanyak 50 orang anak nagari kita tidak diterima untuk masuk SMA 1 Gunung Talang, sehingga pihak Nagari. Tokoh Masyarakat, Komite sekolah anggota DPRD Provinsi, Kepala Dinas dan Kepala cabang dinas melakukan pertemuan untuk mencari solusi dan keputusannya adalah penambahan lokal, ditahun 2023 terjadi lagi permasalahan yang sama dan kita pihak Nagari bersama Masyarakat dan komite sekolah melakukan pertemuan dan hasil pertemuan itu kita sepakat untuk melakukan audiensi dengan gubernur” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Panitia Pembangunan Bapak Martadinata pada 15 Januari 2025)

Berdasarkan fenomena yang terjadi, untuk mengatasi masalah tersebut tergeraknya masyarakat untuk meminta dan mendapatkan akses yang seharusnya mereka dapat yaitu akses kemudahan untuk mengakses lembaga pendidikan, masyarakat melakukan aspirasi dan audiensi dengan pemerintah provinsi meminta untuk dibangunnya Unit Sekolah Baru (USB) ke Pemerintah Daerah, maka terjadinya pembangunan sekolah yang beraal dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mendapat sekolah yang baru dan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, oleh karna pembangunan ini berasal dari aspirasi masyarakat.

“Pembangunan ini diinisiasi oleh masyarakat sendiri karna masyarakat membutuhkan sekolah yang bisa menampung anak mereka untuk sekolah. karna sebelumnya anak-anak disini mengalami kesulitan untuk masuk ke SMA negeri” (Hasil wawancara dengan wali nagari Talang Bapak Zulfadri pada 10 Januari 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Nagari Talang yaitu

“ Pada tahun 2023 kita melakukan audiensi dengan Pemerintah provinsi untuk pembangunan sekolah baru, dan Gubernur pun menyanggupi dengan syarat kita menyediakan tanah untuk pembangunan sekolah tersebut” (hasil wawacara dengan Sekretaris Panitia Pembangunan Bapak Martadinata pada 15 Januari 2025)

Menurut kerangka pemikiran Cohen and Uphoff, keterlibatan publik dapat diklasifikasikan dalam empat fase krusial, fase tersebut meliputi mengambil

keputusan (*participation in decisionmaking*), dalam implementasi (*participation in implementation*), dalam kemanfaatan (*participation in benefits*), dalam evaluasi (*participation in evaluation*)⁷. Secara esensial, fenomena ini dimaknai sebagai kehadiran aktif warga dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

Conyers (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah pilar pembangunan yang berangkat dari prinsip demokrasi. Secara praktis, keterlibatan ini meminimalisir potensi kegagalan melalui penyediaan informasi basis massa yang akurat. Lebih jauh lagi, pelibatan warga dalam fase desain dan persiapan akan meningkatkan akseptabilitas serta rasa memiliki, sehingga proyek tersebut mendapatkan dukungan penuh dari komunitas yang bersangkutan⁸

Gambar 1. 2. Pembangunan Fisik SMAN 3 Gunung Talang



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Cohen dan Uphoff membagi keterlibatan masyarakat ke dalam empat fase utama. Dimulai dari andil dalam penentuan kebijakan (pengambilan keputusan), keterlibatan dalam pelaksanaan program (implementasi), penerimaan dampak positif (pemanfaatan), hingga peran serta dalam peninjauan hasil (evaluasi).

Partisipasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, wujud partisipasi dalam mengambil keputusan dapat berupa menyumbangkan gagasan atau pikiram, kehadiran dalam

⁷ Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World development*, 8(3), 213-235.

⁸ Mulya, D. (2016). Analisis partisipasi masyarakat dan manfaat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa marana kecamatan sindue kabupaten donggala (Doctoral dissertation, Tadulako University).

musyawarah, rapat, pertemuan, audiensi, permintaan, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, wujud partisipasi dalam mengambil keputusan oleh masyarakat Nagari talang ialah melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan permintaan pembangunan sekolah baru dan melakukan musyawarah atau audiensi dengan pemerintah provinsi untuk pembangunan sekolah baru, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Nagari Talang

“Di tahun 2022 kita mengadakan pertemuan dengan pihak komite sekolah, kepala sekolah, kepala dinas, kepala cabang dinas, dan orang tua siswa yang anaknya tak diterima masuk ke sekolah, dan hasilnya penambahan lokal, dan pada tahun 2023 kita selaku masyarakat Nagari melakukan audiensi dengan pemerintahan provinsi untuk meminta pembangunan sekolah baru, untuk yang pergi adalah tokoh masyarakat nagari talang, wali nagari nagari Talang” (wawancara dengan Sekretaris Panitia Pembangunan Bapak Martadinata 25 Juni 2025)

Partisipasi dalam Implementasi, partisipasi dalam tahap ini dapat berupa mengerakan sumber daya dalam pelaksanaan untuk mendukung program pembangunan, sumber daya yang digerakan dapat berupa sumber daya secara fisik, sumabangan dana, dan materi, dalam pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang dalam tahapan partisipasi implentasi, partisipasi masyrakat berupa adanya gotong royong dalam pembersihan lahan, sumbangan uang, dan sumbangan barang

“untuk dalam tahap pelaksanaan sendiri saat pemerintah sudah menyetujui usulan tentang pembangunan sekolah, kita selaku masyarakat nagari talang diminta untuk menyediakan tanah, dan saat tanah sudah kita dapat, masyarakat melakukan sumbangan untuk membeli tanah tersebut, dan setelah tanah itu sudah terbeli kita melakukan gotong royong untuk membersihkan lahan yang akan dibangun sekolah tersebut” (Hasil wawancara dengan Sekretaris panitia pembangunan Martadinata pada 25 Juni 2025)

Partisipasi dalam kemanfaatan, partisipasi dalam tahap ini berupa pengambilan kemanfaatan dari hasil program atau proyek yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas, segi kualitas dapat dilihat dari output proyek tersebut sedangkan segi kuantitas dapat dilihat dari keberhasilan proyek atau program tersebut kehidupan masyarakat yang terdampak, dalam pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang manfaat yang dimabil oleh masyarakat adalah

pemanfaatan sekolah sebagai sarana pendidikan, masyarakat bisa mengakses fasilitas pendidikan tanpa harus mengalami kendala lagi

“kalau untuk pemanfaatannya ditargetkan sekolah ini akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, rencananya akan dibuka 2 lokal untuk para peserta didik baru tersebut” (Hasil wawancara dengan Sekretaris panitia pembangunan Martadinata pada 25 Juni 2025)

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. dan hal hal yang terjadi selama proses pembangunan infrastruktur tersebut, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh apa keberhasilan program pembangunan berdampak pada kehidupan masyarakat disekitar pembangunan tersebut

“evaluasi dilakukan setelah sekolah yang baru dibangun ini sudah berjalan dan mulai menerima siswa” (Hasil wawancara dengan ketua panitia pembangunan Bapak Elwin Andri pada 25 Juni 2025)

Masyarakat memainkan peran krusial mengapa sekolah ini dibangun, lewat aspirasi mereka pemerintah memutuskan untuk membangun unit sekolah baru sebagai jawaban atas masalah yang sedang terjadi, mereka masyarakat ikut serta dalam musyawarah yang membahas tentang rencana permintaan pendirian pembangunan SMAN 3 Gunung Talang lewat mekanisme musyawarah antar masyarakat yang difasilitasi oleh pihak nagari, masyarakat disini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, dan beberapa tokoh pemuda, pengurus masjid hal tersebut peneliti dapatkan lewat wawancara dengan Wali Nagari Talang

“ semua unsur masyarakat terlibat dalam musyawarah rencana permintaan pembangunan mulai dari tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, dan beberapa tokoh pemuda, pengurus masjid di lingkup nagari talang” (Hasil wawancara dengan Wali Nagari Talang pada 15 Januari 2025)

Dalam hal ini ada beberapa aktor-aktor yang berperan dalam proses pembangunan, yang pertama ialah masyarakat setempat mereka adalah warga sekitar lokasi pembangunan para masyarakat yang akan menerima manfaat dari pembangunan, mereka berperan dalam menyampaikan aspirasi tentang kebutuhan

mereka untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan lewat pembangunan sekolah, berpartisipasi dalam musyawarah dan menilai manfaat yang di rasakan dari pembangunan sekolah tersebut. Aktor berikut ialah Pemerintah setempat, yaitu pemerintah Nagari yang memfasilitasi masyarakat untuk mengadakan musyawarah dan mendampingi masyarakat untuk melakukan audiensi dengan pemerintahan provinsi, dan keterlibatan BPN Nagari Talang dalam mendampingi masyarakat dalam setiap musyawarah yang membahas tentang pembangunan SMAN 3 Gunung Talang

Tabel 1.2. Aktor yang terlibat

AKTOR	KETERLIBATAN
Panitia Pembangunan	Keterlibatan panitia pembangunan ini adalah sebagai wadah untuk masyarakat luas dan perantara juga untuk masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan, keterlibatan panitia pembangunan ini dimulai dari tahap awal dari pengambilan keputusan hingga tahapan evaluasi
Tim penggalangan dana	Keterlibatan Tim ini adalah sebagai tim penggalangan dana dimana tim ini bergerak dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan dana guna untuk pembebasan lahan
Niniak Mamak dan Bundo Kandung	Sebagai perwakilan kaum mereka dalam musyawarah didalam tahapan pengambilan keputusan
Wali Nagari	Keterlibatan wali Nagari dalam hal ini adalah dengan memfasilitasi setiap musyawarah yang dilakukan oleh

	masyarakat lalu menjadi pengarah disetiap tahapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
Ketua Bpn	Berperan dalam mendampingi masyarakat dalam musyawarah dan mendampingi masyarakat dalam audiensi dengan pemerintah provinsi

Pemerataan akses pendidikan merupakan elemen krusial dalam target pembangunan nasional yang terus diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Esensi dari proses edukasi adalah mencetak modal manusia yang tidak hanya mumpuni secara intelektual, tetapi juga mampu bersaing secara profesional., terutama di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Namun, tantangan dalam menyediakan akses pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah tak terkecuali di Kabupaten Solok khususnya di Kecamatan Gunung Talang Pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan ini, tetapi sinergi serta partisipasi nyata dari warga setempat menjadi pilar utama yang menyokong keberlangsungan tahapan pembangunan ini secara menyeluruh.

Tidak semua pembangunan yang melibatkan masyarakat mengalami kasus partisipasi masyarakat yang aktif pada tahap awal pembangunan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurraysyah dkk.. menemukan bahwa di Desa Tinggede partisipasi masyarakat sangat rendah warga tidak dilibatkan dalam perencanaan, yang menyebabkan penurunan partisipasi di tahap pelaksanaan dan

pemanfaatan, penelitian ini menunjukkan kebalikan⁹, di Nagari Talang partisipasi masyarakat aktif pada awal tahapan partisipasi menurut kerangka Cohen & Uphof

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sembel dkk (2017) di desa Sinigon Barat didapatkan hasil bahwa rendahnya kehadiran masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, minimalnya kontribusi berupa material bangunan maupun donasi peralatan menjadi indikator nyata, yang diperparah dengan keengganan warga dalam menyalurkan aspirasi serta rendahnya tingkat kehadiran dalam forum perencanaan pembangunan.¹⁰, berbeda dengan kasus pada pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pembangunan, hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan mekanisme resmi seperti forum musyawarah dapat menjadi jalan untuk menjalankan partisipasi

Pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya di tingkat SMA, merupakan langkah untuk menjadi instrumen krusial dalam memperluas jangkauan serta mutu pembelajaran di wilayah-wilayah lokal. Namun, dalam praktiknya, proses pembangunan fasilitas pendidikan sering kali bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi aktor utama, sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat semata. Berbeda dengan pola umum tersebut, pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang menunjukkan fenomena yang menarik dimana Masyarakat Nagari Talang aktif pada tahapan awal pembangunan seperti pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan, penelitian ini menjadi penting karna penelitian yang membahas partisipasi masyarakat bermula dari partisipasi masyarakat yang rendah atau menurun, penelitian ini hadir sebagai salah satu contoh penelitian yang berangkat dari partisipasi masyarakat yang aktif dan berpengaruh dalam pembangunan

⁹ Nuraisyah, N., Syukur, M., & Sussanti, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *Jurnal Administrator*, 4(1), 50-63.

¹⁰ Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Pentingnya melihat partisipasi masyarakat adalah sebagai gambaran dimana adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung suatu pembangunan dapat mempengaruhi pembangunan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada pembangunan SMAN 3 Gunung Talang ini, adanya upaya masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ini dengan dibuat musyawarah dan beraudiensi dalam membuat keputusan untuk permintaan pembangunan sekolah, tidak semua pembangunan di tingkat lokal mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal di seluruh tahapan pembangunan. Di banyak kasus, partisipasi masyarakat sering kali bersifat parsial atau seremonial, di mana masyarakat hanya dilibatkan saat kegiatan gotong royong atau sekadar sebagai penerima manfaat tanpa memiliki ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan dan proses yang lebih lanjut

Banyak program pembangunan yang gagal karena rendahnya partisipasi masyarakat namun, di Nagari Talang pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang menunjukkan partisipasi masyarakat yang aktif pada tahap awal pembangunan, kondisi ini menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan sma negeri 3 gunung talang, Pembangunan Sma negeri 3 gunung talang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang aktif pada tahap awal pembangunan dan mempengaruhi pembangunan, fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena tidak semua pembangunan berbasis masyarakat menunjukkan pola partisipasi yang lengkap dan aktif

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mempengaruhi jalannya pembangunan suatu proyek, agar hasil pembangunan nantinya sesuai dengan keinginan masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat tersebut, dalam pembangunan SMAN 3 Gunung Talang keterlibatan masyarakat dapat dikatakan belum optimal, Masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan, lalu masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemanfaatan nantinya masyarakat akan menggunakan sekolah tersebut, tapi dalam tahapan evaluasi masyarakat tidak

ikut aktif dalam tahapan tersebut, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kondisi tersebut dengan menganalisis tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang dalam mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang dengan menggunakan model teori tahapan partisipasi oleh Cohen dan Uphoff dimana Teori ini membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana tahapan-tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Keempat tahapan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat hadir di setiap fase pembangunan, maka dari itu judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tahapan Partisipasi Masyarakat Yang Dilakukan oleh Masyarakat Nagari Talang dalam Mendukung Pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang untuk mendukung pembangunan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berguna sebagai sarana penulis untuk memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan SMAN 3 Gunung Talang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya peneliiian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap Masyarakat Nagari Talang dan Masyarakat luas tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pentingnya bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat.

